

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. PERKEBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING ATAU BARANG LAINNYA SERTA RESIKO KEDEPAN.

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Perkembangan Inflasi Januari 2026

Pada Januari 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,81. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) bulan Januari 2026 sebesar 0,40 persen dan deflasi year to date (y-to-d) bulan Januari 2026 sebesar 0,40 persen. Inflasi y-on-y (year-on-year) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 19,22 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,98 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,82 persen; kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,76 persen. Selanjutnya, terdapat tiga kelompok yang

mengalami deflasi y-on-y yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan

sebesar 0,20 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,32 persen; serta kelompok pendidikan sebesar 26,95 persen.

1. Perkembangan Inflasi Februari 2026

Pada Februari 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Lampung Timur sebesar 3,74 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,98. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Februari 2026 sebesar 0,15 persen dan deflasi year to date (y-to-d) bulan Februari 2026 sebesar 0,25 persen.

Inflasi y-on-y (year-on-year) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan

oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 28,73 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,28 persen.

Selanjutnya, terdapat empat kelompok yang mengalami deflasi y-on-y yaitu kelompok

transportasi sebesar 0,12 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,20 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,32 persen; serta kelompok pendidikan sebesar 26,95 persen.

1. Perkembangan Inflasi Maret 2026

Pada Maret 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,03. Inflasi y-on-y (year-on-year) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 12,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,41 persen; kelompok kesehatan sebesar 7,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,66 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,80 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,27 persen. Selanjutnya, terdapat tiga kelompok yang mengalami deflasi y-on-y yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,20 persen; serta kelompok pendidikan sebesar 26,95 persen

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1. Keterjangkauan Harga

Terdapat fluktuasi harga bahan pokok dan penting yang disebabkan permintaan masyarakat yang meningkat pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 serta menjelang hari raya Idul Fitri 1447 H yang berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan menjelang dan setelah lebaran. Untuk itu dilakukan stabilisasi Harga dengan sidak pasar untuk memastikan tidak terjadi permainan harga oleh oknum pedagang yang mencari keuntungan serta melakukan Gerakan pangan murah. Selain itu ketidakstabilan dan konflik yang terjadi antara AS-Israel melawan Iran dan ditutupnya selat Hormus beresiko untuk memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia pada tahun 2026.

2. Ketersediaan Pasokan

Akibat Curah Hujan tinggi pada bulan februari terjadi banjir yang menggenangi lahan pertanian seluas 80 Ha dengan umur padi rata-rata 30 hari di kecamatan Way Jepara yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pasokan pada komoditi beras. Upaya yang dilakukan dalam penanganan banjir ini yaitu dilakukan normalisasi sungai Way Penet yang menjadi penyebab banjir. Untuk menormalisasi ketersediaan pasokan dilakukan himbauan kepada seluruh OPD terkait dan Camat untuk melakukan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi.

3. Kelancaran Distribusi

Masuknya Kebutuhan Pangan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur sebagian didatangkan dari luar baik Kabupaten Lampung Timur, seperti cabai dan bawang merah serta kebutuhan pokok lainnya baik yang masuk maupun yang didistribusikan keluar kabupaten mempengaruhi harga bahan pokok yang bila terjadi permasalahan ataupun hambatan dalam kelancaran transportasi ini sangat berpengaruh terhadap harga bahan pokok yang cenderung meningkat. Dan terpantau pada saat cuaca buruk pada awal desember mempengaruhi

transportasi laut di Bakauheni yang mengakibatkan distribusi barang tidak lancar.

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif antar OPD terkait perlu ditingkatkan sehingga sinergisitas dalam upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terpadu dan juga fasilitasi kerja sama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan penting dengan Kabupaten Lampung Tengah, Pemkot Metro dan Pemkot Bandar Lampung yang telah terjalin. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur terpenuhi. Serta perlu diperluas kerjasama dengan kabupaten lainnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

Terdapat fluktuasi harga bahan pokok dan penting yang disebabkan permintaan masyarakat yang meningkat pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 serta menjelang hari raya Idul Fitri 1447 H yang berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan menjelang dan setelah lebaran. Untuk itu dilakukan stabilisasi Harga dengan sidak pasar untuk memastikan tidak terjadi permainan harga oleh oknum pedagang yang mencari keuntungan serta melakukan Gerakan pangan murah. Selain itu ketidakstabilan dan konflik yang terjadi antara AS-Israel melawan Iran dan ditutupnya selat Hormus beresiko untuk memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia pada tahun 2026.

2. Ketersediaan Pasokan

Akibat Curah Hujan tinggi pada bulan februari terjadi banjir yang menggenangi lahan pertanian seluas 80 Ha dengan umur padi rata-rata 30 hari di kecamatan Way Jepara yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pasokan pada komoditi beras. Upaya yang dilakukan dalam penanganan banjir ini yaitu dilakukan normalisasi sungai Way Penet yang menjadi penyebab banjir. Untuk menormalisasi ketersediaan pasokan dilakukan himbauan kepada seluruh OPD terkait dan Camat untuk melakukan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi.

3. Kelancaran Distribusi

Masuknya Kebutuhan Pangan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur sebagian didatangkan dari luar baik Kabupaten Lampung Timur, seperti cabai dan bawang merah serta kebutuhan pokok lainnya baik yang masuk maupun yang didistribusikan keluar kabupaten mempengaruhi harga bahan pokok yang bila terjadi permasalahan ataupun hambatan dalam kelancaran transportasi ini sangat berpengaruh terhadap harga bahan pokok yang cenderung meningkat. Dan terpantau pada saat cuaca buruk pada awal desember mempengaruhi transportasi laut di Bakauheni yang mengakibatkan distribusi barang tidak lancar.

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif antar OPD terkait perlu ditingkatkan sehingga sinergisitas dalam upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terpadu dan juga fasilitasi kerja sama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan penting dengan Kabupaten Lampung Tengah, Pemkot Metro dan Pemkot Bandar Lampung yang telah terjalin. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur terpenuhi. Serta perlu diperluas kerjasama dengan kabupaten lainnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan langkah konkret dengan strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan; Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan yaitu:

A. Keterjangkauan harga

1. Pemantauan harga secara lebih intensif melalui data harian dari 9 pasar Daerah yang ada di Kabupaten Lampung Timur (Pasar Way Jepara, Sekampung, Purbolinggo, Pekalongan, Labuhan Ratu, Sukadana, Raman Utara, Labuhan Maringgai dan Melinting) yang dilakukan TPID melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga dinas ketahanan pangan TPH dan Perkebunan
2. Koordinasi dengan SPBE dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan LPG terutama menjelang Natal dan tahun Baru 2026, dalam hal ini ketersediaan LPG untuk masyarakat cukup
3. Melakukan sidak pasar terhadap harga bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga serta penimbunan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
4. Memantau pergerakan harga, melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga dengan memperbaiki kualitas data dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta OPD terkait serta Badan Pusat Statistik

B. Ketersediaan Pasokan

- Mendorong OPD terkait untuk memperhatikan pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional dengan memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah
- Memperkuat Kelembagaan petani melalui Gapoktan serta usaha-usaha tani dalam pemenuhan ketersediaan pangan
- Memberikan bantuan bibit Bawang kepada petani Bawang di Kecamatan Pekalongan dan melakukan pendampingan pada saat panen untuk memenuhi kebutuhan Bawang di Kabupaten Lampung Timur
- Melakukan gerakan tanam padi serentak bersama Pangdam dan Wakil Gubernur seluas 500 Ha di Kecamatan Way Jepara
- Melakukan gerakan panen raya jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 di kecamatan Sekampung Udik

Memastikan ketersediaan pasokan di Gudang yang dikoordinasikan oleh BULOG Sub Drive Lampung Tengah, melakukan koordinasi untuk memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok di wilayah kecamatan se kabupaten Lampung Timur

- Koordinasi dengan Bulog serta Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan untukantisipasi ketersediaan bahan pokok terutama beras serta penyerapan padi di Kabupaten Lampung Timur dengan harga padi Rp. 6.500,00

C. Kelancaran Distribusi

- Mendorong perdagangan antar daerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah, serta membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi seta meningkatkan Infrastruktur Perdagangan;
- pengawalan dalam pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, tidak hanya dari sisi daftar penerima bantuan melainkan juga mekanisme penyaluran dan ketersediaan pasokan komoditasnya agar tidak mendorong kenaikan harga.
- Pemantauan harga secara lebih intensif melalui data harian pasar Daerah yang ada dan melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- Pasar Daerah yang menjadi pantauan adalah Pasar Way Jepara, Sekampung, Purbolinggo, Pekalongan, Lab. Ratu, Sukadana, Raman Utara, Lab. Maringgai dan Melinting
- Pemantauan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus mudik serta kelancaran distribusi pasokan oleh Bupati bersama Forkopimda pada H-1 Idul Fitri 1447 H

D. Komunikasi Efektif

- Mendorong OPD terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebuan untuk efektivitas percepatan realisasi APBD, termasuk melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga;
- Mengantisipasi disparitas harga komoditas antara periode panen yang rendah dengan periode tanam yang tinggi serta jumlah permintaan masyarakat pada bulan-bulan tertentu khususnya menjelang hari-hari besar.
- Melakukan himbauan untuk berbelanja secara bijak disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga dengan melakukan operasi pasar.
- Melakukan himbauan gerakan menanam cabai rawit di pekarangan rumah.
- Melalui Bulog Kerjasama dengan Toko penyedia sembako untuk Rumah Pangan Kita.
- Melaksanakan Rapat Koordinasi serta HLM yang didukung juga oleh Bank Indonesia sebagai upaya melakukan pengendalian harga dan meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang masuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- Memfasilitasi penyerapan padi pasca panen raya bekerjasama dengan bulog sehingga petani dapat menjual padinya dengan harga yang sesuai.
- Komunikasi efektif terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan, dan himbauan untuk berbelanja secara bijak untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemkab Bantul, Pemkot Bandar Lampung dan Pemkot Metro dalam rangka Kerjasama antar daerah yang sudah terjalin.
-

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah diperlukan sinergisitas antara OPD terkait sehingga harga bahan pokok dan penting khususnya dapat terkendali dan terjangkau oleh masyarakat. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengendalian Inflasi daerah, BULOG dan Satgas Pangan perlu terus berkoordinasi dalam memastikan ketersediaan cadangan beras serta keterjangkauan harga komoditas di pasar .
2. Perlu adanya antisipasi terhadap disparitas harga termasuk komoditas hortikultura antara periode panen yang rendah dengan periode tanam yang tinggi.
3. Mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan pokok dan penting dengan bekerjasama dengan satgas pangan, OPD terkait dan pihak kepolisian terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri
4. Komunikasi terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan, dan himbauan untuk berbelanja secara bijak untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat serta menjaga stabilitas harga dengan melakukan operasi sidak pasar.
5. Perlu ditingkatkan Kerjasama Antar Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta diluar Provinsi dalam rangka peningkatan perekonomian serta mempromosikan produk unggulan dan saling koordinasi tentang kebutuhan pokok yang dibutuhkan daerah masing-masing.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi resiko kenaikan harga.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui TPID dan Satgas Pangan perlu terus melakukan koordinasi baik dengan Bulog maupun stake holder terkait untuk memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok.
3. Komunikasi terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan, dan himbauan untuk berbelanja secara bijak untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat serta menjaga stabilitas harga dengan melakukan operasi sidak pasar.
4. Melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan TPHP agar dapat merencanakan kegiatan Pasar murah serta Pangan Murah yang dapat dilakukan secara rutin pada saat terjadi kenaikan harga bahan pokok terutama pada saat terpantau terjadinya fluktuasi harga yang tinggi, pada saat Ramadhan dan Hari Besar Nasional. Dalam hal ini Mobil pangan keliling yang sudah ada dan diluncurkan agar dapat hadir memenuhi kebutuhan pokok sehingga Masyarakat dapat terbantu
6. Mengoptimalkan Kerjasama antar daerah yang sudah terjalin serta menginisiasi untuk pelaksanaan KAD pada daerah lainnya yang potensial untuk bersama sama meningkatkan perekonomian Masyarakat.